

## RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Sektor Pertambangan. Keterbukaan informasi dalam sektor pertambangan memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan dan partisipasi stakeholder, khususnya pelaku usaha tambang. Isu-isu kompleks terkait regulasi dan sistem informasi yang tidak terorganisir dengan baik menjadi penghambat utama dalam mencapai keterbukaan informasi. Kesulitan dalam mengakses informasi dapat menyebabkan ketidakpatuhan, dampak hukum, dan konsekuensi negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Di Indonesia, di mana sektor pertambangan berkontribusi besar pada ekonomi, keterbukaan informasi menjadi krusial, mempengaruhi tidak hanya operasional bisnis tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Evaluasi kebijakan dan praktek saat ini dibutuhkan untuk memastikan akses terhadap informasi yang penting.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana aksesibilitas informasi publik yang diterima oleh pelaku usaha di sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi 6 aspek, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Badan Pelaksana, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data digunakan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Validitas dengan menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi telah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi. Pada aspek standar dan sasaran, akses informasi dapat diakses dengan mudah tanpa ada pengecualian. Pada aspek sumber daya masih dalam tahap pengembangan. Pada aspek karakteristik badan pelaksana, aksesibilitas sudah cukup bagus tetapi perlu perbaikan pada perbaruan data secara berkala. Pada aspek sikap pelaksana, informasi yang diberikan sudah cukup transparan dan ada komitmen dari pelaksana. Pada aspek komunikasi antar badan pelaksana, keselaran kebijakan perlu banyak perbaikan khususnya perbedaan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada aspek kondisi sosial, ekonomi dan politik, kegiatan pertambangan dengan resiko yang besar memaksa adanya kebijakan keterbukaan informasi dan menarik investor karena aksesibilitas dalam informasi serta memaksa pemerintah untuk terus memperbaiki akses informasi yang ada.

**Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi

## SUMMARY

This research is entitled "Implementation of Public Information Transparency Policy in the Mining Sector." Information transparency in the mining sector has significant impacts on the trust and participation of stakeholders, particularly mining industry players. Complex issues related to poorly organized regulations and information systems are the main obstacles to achieving information transparency. Difficulty in accessing information can lead to non-compliance, legal consequences, and negative consequences for the environment and society. In Indonesia, where the mining sector contributes significantly to the economy, information transparency is crucial, influencing not only business operations but also environmental and social sustainability. Evaluation of current policies and practices is needed to ensure access to vital information.

The objective of this research is to describe how public information accessibility is perceived by business players in the mining sector. This research uses the implementation model proposed by Van Meter and Van Horn, which includes six aspects: Policy Standards and Targets, Resources, Implementing Body Characteristics, Communication between Implementing Bodies, Implementer Attitudes, and Social, Economic, and Political Conditions. The research methodology employed is descriptive qualitative. The informant selection technique is purposive sampling. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and literature reviews. The data analysis method used is interactive analysis, with validity ensured through triangulation.

The research results indicate that the implementation of information transparency policies has progressed well, although there are some aspects that need improvement. In terms of policy standards and targets, information access is easily available without exceptions. In the resources aspect, it is still in the development stage. Regarding the characteristics of the implementing body, accessibility is good but requires periodic data updates. In terms of implementer attitudes, the provided information is transparent, and there is commitment from the implementers. Concerning communication between implementing bodies, policy coherence needs improvement, especially regarding information disparities between the central and local governments. In terms of social, economic, and political conditions, the high-risk nature of mining activities necessitates information transparency policies, attracting investors due to information accessibility and compelling the government to continuously improve existing information access.

**Keyword** : policy implementation, Information Disclosure